# IKHTISAR EKSEKUTIF

Pertanggung jawaban Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat kepada publik ataupun pemberi mandat (dalam hal ini Bupati Langkat) pada prinsipnya merupakan kewajiban Kepala Kantor beserta jajarannya untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang diembannya kepada masyarakat. Pertanggung jawaban ini tidak semata – mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat melainkan juga untuk meningkatkan efesiensi, efektifitas, produktifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat serta fungsi pengawasan instansi terkait terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut.

Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 ini disajikan beberapa pokok permasalahan yang dapat berupa keberhasilan maupun ketidak berhasilan kinerja organisasi secara menyeluruh, yaitu :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat yang diamanatkan oleh Bupati Langkat telah dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya.
2. Kepala Kantor beserta seluruh pejabat dan staf Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam meningkatkan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik guna membiayai pembangunan daerah sesuai dengan visi yang ditetapkan dan selaras dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya.
3. Ukuran keberhasilan ataupun kinerja atas pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewajiban seperti yang disebut pada point 1 dan 2 dapat diperoleh dari data – data indikator kinerja.
4. Dalam pencapaian sasaran, dari 5 (lima) sasaran strategik yang ditetapkan, telah dilaksanakan semuanya, namun tingkat keberhasilan dari beberapa sasaran belum berhasil diwujudkan secara optimal. Kekurang berhasilan dari beberapa sasaran lebih disebabkan adanya perubahan kondisi di lapangan dari kondisi yang telah diperhitungkan dalam proses perencanaan.
5. Dari beberapa sasaran yang telah tercapai tersebut, masih terdapat perbedaan dengan kondisi yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini terlihat pada indikator kinerja yang digunakan pada pencapaian sasaran ini adalah pada tingkat *output*, sedangkan yang diharapkan masyarakat adalah pada tingkat *outcome*. Penyebabnya adalah organisasi belum secara tegas mendefenisikan indicator kinerja outcome untuk seluruh sasaran yang ada sesuai dengan kondisi yang diharapkan masyarakat. Dalam tahun mendatang tentunya akan dirumuskan lagi indikator keberhasilan yang menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat.
6. Organisasi belum dapat menyajikan realisasi keuangan berdasarkan capaian masing – masing sasaran tanpa membedakan jenis anggaran. Hal ini disebabkan sistem keuangan yang digunakan masih belum mengacu pada sistem keuangan yang berbasis kinerja.

S t a b a t, 2022



# DAFTAR ISI

**IKHTISAR EKSEKUTIF** i

**DAFTAR ISI** iii

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BAB I** | **PENDAHULUAN** .............................................................................. | 1 |
|  | A. Latar Belakang .............................................................................. | 1 |
|  | B. Maksud dan Tujuan ....................................................................... | 1 |
|  | C. Tugas Pokok dan Fungsi .............................................................. | 3 |
|  | D. Core Area dan Isu –isu Strategik ................................................... | 3 |
|  | E. Profil Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Langkat ............. | 4 |
|  | F. Sistematika LAKIP 2020 ................................................................ | 6 |
| **BAB II** | **RENCANA STRATEGIK** ............................................................... | 7 |
|  | A. Pendahuluan .................................................................................. | 7 |
|  | B. Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Langkat ......... | 8 |
|  | C. Tujuan dan Sasaran Strategik ........................................................ | 9 |
|  | D. Rencana Strategik Tahun 2020...................................................... | 11 |
|  | E. Rencana Kinerja Tahun 2020....................................................... | 12 |
| **BAB III** | **AKUNTABILITAS KINERJA 2020** ............................................. | 16 |
|  | A. Organisasi Capaian Kinerja 2020 ................................................... | 16 |
|  | B. Analisis Atas Pencapaian Sasaran Strategik 2020 ........................ | 17 |
|  | C. Analisis Atas Capaian Keuangan 2020 .......................................... | 26 |
|  | D. Strategi Pemecahan Masalah .......................................................... | 30 |
| **BAB IV** | **PENUTUP** ......................................................................................... | 31 |
| **FORM.PPK** | .............................................................................................................. | 31 |
| **FORM.PPS** | .............................................................................................................. | 32 |

# BAB I PENDAHULUAN

1. **LATAR BELAKANG.**

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat senantiasa berupaya untuk melakukan pembenahan diri sesuai dengan tuntutan lingkungan perubahan yang terjadi di Kabupaten Langkat. Sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mendorong *good governance*, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat harus mampu menjawab pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui penerapan mekanisme pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur.

Penerapan pencapaian *good governance* berlandaskan pada TAP MPR No. XI/MPR/1998 dan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN yang aturan pelaksanaannya didasarkan pada Inpres No. 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Atas ketentuan hukum diatas, maka Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat wajib membuat Laporan Akuntabilitas.

Dengan dilatar belakangi aturan hukum tersebut, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat mencoba melakukan pengembangan mekanisme pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur dengan mengacu kepada Rencana Jangka Panjang yang tertuang dalam Rencana Strategik Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat.

# MAKSUD DAN TUJUAN.

Maksud dan tujuan Laporan akuntabilitas ini adalah untuk memberikan gambaran terhadap kontribusui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat Dalam Melaksanakan Tugas Bidang Urusan Pemerintahan Umum.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini memberi tuntunan kepada semua instansi Pemerintah untuk menyiapkan laporan kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Esensi dari sistem AKIP bagi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen Pemerintah di Lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat untuk memastikan

bahwa visi, misi dan tujuan strategik Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat dapat dipenuhi implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Atas dasar tersebut, siklus sistem AKIP diawali dengan penyusunan Rencana Strategik yang mendefenisikan visi, misi dan tujuan / sasaran strategik Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi dan tujuan/sasaran strategik tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat yang berhasil diperoleh. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para *stakeholder* dalam wujud Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama, laporan akuntabilitas kinerja bagi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* (Bupati, DPRD dan masyarakat). Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat sebagai upaya memperbaiki kinerja di masa mendatang. Dua fungsi utama Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP setiap instansi Pemerintah.

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat Tahun 2021 mencakup hal – hal berikut ini :

* Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadi LAKIP 2021 sebagai sarana pertanggungjawaban Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun 2021. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana tujuan dan sasaran strategik telah dicapai selama Tahun 2021.
* Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadi LAKIP 2021 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat bagi upaya – upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

# TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor : 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat, yang mana telah diubah dengan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat dan Peraturan Bupati Langkat No. 14 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat, mengemban tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dengan fungsi sebagai berikut :

* 1. Merumuskan dan mengembangkan kebijakan teknis Bidang Kewaspadaan Nasional, Bina Ideologi, Politik dan Wawasan Kebangsaan serta Ketahanan Ekonomi, Agama, Seni dan Budaya Masyarakat.
  2. Menyusun Rencana Program Kerja, Kegiatan Laporan Kinerja dan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Tugas;
  3. Pembinaan, Fasilitasi dan pelaksanaan tugas di Bidang Kewaspadaan Nasional, Bina Ideologi, Politik Dalam Negeri Lingkup Kabupaten dan Wawasan Kebangsaan serta Ketahanan Ekonomi, Agama, Seni dan Budaya Masyarakat;
  4. Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Lembaga / Orang Asing, Ketahanan Ideologi dan Bela Negara, Organisasi Politik, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Seni dan Budaya, Organisasi Profesi dan Yayasan;
  5. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

# CORE AREA DAN ISU – ISU STRATEGIK

Core Area adalah karakteristik khusus atau sasaran utama yang ingin dicapai suatu instansi Pemerintah, yang dicerminkan oleh peran instansi Pemerintah tersebut sesuai tugas pokok dan fungsinya. Core Area dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat yang diidentifikasi dari fungsi instansi tersebut adalah :

1. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap peran dan fungsi organisasi Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Meningkatnya kualitas aparatur secara bertahap.
3. Terselenggaranya pelayanan efektif dan efisien.
4. Terciptanya kehidupan IPOLEKSOSBUD yang demokratis.
5. Terwujudnya rasa tanggung jawab dan rasa memiliki terhadap bangsa dan negara.
6. Terwujudnya rasa aman dan tertib didalam masyarakat.
7. Terciptanya pola dan pedoman penanggulangan daerah rawan konflik atau bencana.
8. Terwujudnya penanganan dan penanggulangan daerah rawan konflik atau bencana secara proaktif dan efektif.

Isu – isu strategik adalah sesuatu yang menjadi fokus utama perhatian dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat yaitu :

1. Masyarakat sangat heterogen.
2. Wilayah yang luas.
3. Terdapatnya daerah rawan konflik atau bencana.
4. Maraknya peredaran gelap narkoba di kalangan generasi muda.
5. Peran serta Lembaga Swasta/ Pihak Ketiga relatif rendah.

# PROFIL KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. LANGKAT

## STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tanggal 04 Desember 2007, tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat, yang mana telah dirubah dengan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2015 tanggal 12 Januari 2015 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah maka Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat merupakan salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut :

* 1. Kepala Kantor (Eselon III/a) mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
  2. Subbag. TU, dipimpin oleh seorang Kasubbag Tata Usaha (Eselon IV/a) mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Kantor di bidang ketatausahaan yang meliputi pengelolan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, urusan umum dan ketatalaksanaan. menyiapkan dan menghimpun renstra, renja dan lakip..
  3. Kepala Seksi Kewaspadaan Nasional (Eselon IV/a)
  4. Kepala Seksi Wawasan Kebangsaan dan Politik (Eselon IV/a)
  5. Kepala Seksi Ketahanan Sosial dan Ekonomi (Eselon IV/a).

Di samping 5 (lima) orang Jabatan Struktural sebagaimana diuraikan di atas, terdapat 11 (sebelas) orang PNS dan 12 (dua belas) orang Tenaga Honorer.

## SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah SDM per 31 Desember 2021 untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat adalah sebanyak 16 orang.

# Komposisi SDM tersebut berdasarkan fungsional jabatan, yaitu :

* Pejabat Struktural : 5 orang
* Pejabat fungsional : - orang
* Tenaga administrasi : 11 orang

# Jumlah : 16 orang

* + **Komposisi SDM berdasarkan pendidikan dan golongan :**
* Menurut Strata Pendidikan :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO. | PENDIDIKAN FORMAL | JUMLAH |
| 1. | S2 | 1 |
| 2. | Sarjana | 11 |
| 3. | D3/Sarjana Muda | 0 |
| 4. | SLTA | 4 |
| 5. | SLTP | - |
| 6. | SD | - |
| 7. | Tenaga Honorer | 12 |
|  | **J u m l a h** | **28** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * Menurut Golongan : |  | |
| - Golongan IV : | 3 | orang. |
| - Golongan III : | 9 | orang. |
| - Golongan II : | 4 | orang. |
| - Golongan I : | - | orang. |

- Honorer : 12 orang. Jumlah : 28 orang

## SARANA DAN PRASARANA

* Luas T a n a h : 2280 m2.
* Bangunan Kantor : 1 (satu) ruang Pimpinan.

1 (satu) ruang KTU

1 (satu) ruang Bagian Tata Usaha. 1 (satu) ruang Aula.

3 (tiga) ruang Bidang.

1 (satu) ruang Dharma Wanita

1 (satu) ruang Bagian Keuangan 4 (empat) garasi mobil

* M o b i l : 3 (tiga) unit mobil dinas.
* Sepeda Motor : 8 (delapan) unit.
* Fasilitas lainnya, berupa komputer sebanyak 12 (dua belas) unit dan mesin pendingin ruangan sebanyak 15 (lima belas) unit.

# SISTEMATIKA LAKIP 2021

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat selama tahun 2020. Capaian kinerja (*performance results*) 2021 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) 2021 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diindentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja masa datang. Dengan pola fikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat tahun 2021 dapat diilustrasikan dalam bagan berikut ini.

# Uraian singkat masing – masing bab adalah sebagai berikut :

Bab I – Gambaran Umum, menjelaskan secara ringkas Profil Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat, Menjabarkan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan Penyusunan dan Penyampaian LAKIP 2021 ini.

Bab II – Rencana Strategik, menjelaskan muatan Rencana Strategik Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat untuk Periode 2019 – 2024 dan Rencana Kinerja Tahun 2021.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan Analisis Pencapaian Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat dikaitkan dengan pertanggung jawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategik untuk tahun 2021.

Bab IV – Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat tahun 2021 dan menguraikan rekomondasi yang diperlukan bagi perbaikan di masa mendatang.

# BAB II RENCANA STRATEGIK

Sebagai sebuah instansi sektor publik, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat mempunyai Rencana Strategik yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk tahun 2019 – 2024 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategik Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini. Kemudian sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2021 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja (*Perfomance Plan*) 2021.

# PENDAHULUAN

Dalam sistem akuntabilitas instansi Pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi Pemerintah. Perencanaan Strategik instansi Pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan *stakeholder* dan menjawab tuntutan lingkungan strategik baik nasional maupun global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan tantangan/ kendala (*threats*) yang ada. Analisis terhadap unsur – unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi Pemerintah.

Dengan perkataan lain, rencana strategik yang disusun oleh suatu instansi Pemerintah setidaknya mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realisitis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan/ kegagalan. Dengan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan instansi Pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Perencanaan strategik bersama pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah.

Perencanaan strategik setidaknya digunakan untuk menjawab pertanyaan – pertanyaan :

* 1. Dimana kita berada sekarang.
  2. Kemana kita akan menuju, dan
  3. Bagaimana kita menuju kesana.

Dengan melakukan analisis internal dan eksternal, para perencana strategik mendefenisikan misi organisasi untuk menggambarkan posisi organisasi saat ini. Kemudian visi dirumuskan untuk menjabarkan kemana organisasi akan dibawa. Penjabaran dari visi akan dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategik organisasi, yang merupakan kondisi spesifik yang dicapai oleh organisasi didalam memenuhi visi misinya. Pertanyaan bagaimana menuju kesana dijawab dengan merumuskan strategik pencapaian tujuan dan sasaran dalam wujud menetapkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh organisasi.

Dari uraian diatas, unsur – unsur yang perlu secara formal didefenisikan dalam perencanaan strategik adalah pernyataan visi dan misi, penjabaran tujuan dan sasaran strategik serta perumusan strategik pencapaian tujuan/ sasaran berupa program dan kegiatan.

# RENSTRA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. LANGKAT

Rencana strategik Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat disusun berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat yang melibatkan seluruh unsur di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat yang dimotori oleh Tim Penyusun yang diketuai oleh Kepala Kantor. Renstra yang disusun merupakan alat kendali dan tolok ukur bagi manajemen Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang diemban Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat selama 5 (lima) tahun dan tahunan serta untuk penilaian keberhasilan pada setiap tingkat administratif Pemerintahan.

Disamping itu, Renstra yang disusun juga untuk memacu penyelenggaraan pembangunan di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat lebih terarah dan terjamin tercapainya sasaran strategik pembangunan 5 (lima) Tahun mendatang.

Bagi manajemen Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat, Renstra dipandang sebagai :

* Merupakan alat bantu bagi manajemen penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat.
* Merupakan gambaran visi, misi, persepsi, interpretasi serta strategi Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat untuk mengantisipasi tantangan pembangunan yang dihadapi.
* Sebagai alat untuk memacu dan memotivasi aparat serta masyarakat dalam proses mencapai sasaran yang ditetapkan.

Sebagai alat bagi manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan memang selaras dengan upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategik. Dalam dokumen Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat 2019

* 2024 secara formal didefenisikan tujuan dan sasaran strategik serta strategi pencapaiannya (program dan kegiatan). Pada bagian selanjutnya bab ini, akan diuraikan secara substansi Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat 2019
* 2024 tersebut.

# TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIK

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat menetapkan tujuan strategik berdasarkan visi, misi dan faktor – faktor kunci keberhasilan. Sasaran – sasaran strategik Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik organisasi dirumuskan untuk masing – masing tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan dan sasaran strategik yang ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut: ***Pertama* :** “Mewujudkan Eksistensi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat“, *dengan tujuan* :

# Tujuan 1 ;

Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sasaran** | | **Program** |
| 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |
| 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Sda |
| 3 | Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Sda |
| 4 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Sda |
| 5 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Sda |
| 6 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Sda |
| 7 | Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan | Sda |
| 8 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Sda |
| 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Sda |
| 10 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Sda |
| 11 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Sda |
|  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sasaran** | | **Program** |
| 12 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan | Sda |
| 13 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Sda |

***Kedua* :** “Mewujudkan Kehidupan IPOLEKSOSBUD yang Sehat, Stabil dan Dinamis“, *dengan tujuan* :

# Tujuan 2 :

Meningkatkan Kehidupan IPOLEKSOSBUD yang Sehat, Stabil dan Dinamis.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sasaran** | | **Program** |
| 14 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik |

# Tujuan 3 :

Meningkatkan Rasa Tanggung Jawab dan Rasa Memiliki Terhadap Bangsa dan Negara

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sasaran** | | **Program** |
| 15 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan |
| 16 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antara Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasiltasi Penaganan Konflik Sosial |

***Ketiga :*** “Mewujudkan Situasi dan Kondisi yang Kondusif di Daerah dan Memelihara Stabilitas Ekonomi yang Sehat dan Dinamis“, *dengan tujuan* :

# Tujuan 4 :

Meningkatkan Perlindungan Masyarakat.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sasaran** | | **Program** |
| 17 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan |
| 18 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya |

# RENCANA STRATEGIK TAHUN 2021

Rencana strategik tahun 2021 merupakan bagian dari Renstra lima tahunan yang ditetapkan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat terdiri dari Sasaran, Program dan Kegiatan yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2021.

Untuk tahun 2021 sasaran, program kerja dan kegiatan/ aktifitas yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

# Sasaran 1 :

Terselenggaranya pelayanan efektif dan efisien.

|  |  |
| --- | --- |
| **Program Kerja** | **Kegiatan / Aktifitas** |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3. Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 7. Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 11. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 13. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan 14. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
|  |  |

# Sasaran 2 :

Terciptanya kondisi IPOLEKSOSBUD yang sehat, dinamis dan demokratis.

|  |  |
| --- | --- |
| **Program Kerja** | **Kegiatan/ Aktifitas** |
| Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | 1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah |

# Sasaran 3 :

Terwujudnya partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam memelihara integritas bangsa.

|  |  |
| --- | --- |
| **Program Kerja** | **Kegiatan/ Aktifitas** |
| Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 1. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan |
| Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasiltasi Penaganan Konflik Sosial | 1. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antara Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah |

# Sasaran 4 :

Terwujudnya rasa aman dan tertib dalam masyarakat.

|  |  |
| --- | --- |
| **Program Kerja** | **Kegiatan/ Aktifitas** |
| Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | a. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah |
| Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | 1. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah |

# RENCANA KINERJA TAHUN 2021

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategik Tahun 2019 – 2024, disusun suatu Rencana Kinerja (*Perfomance Plan*) setiap tahunnya. Rencana kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan.

Target kinerja ini menunjukkan nilai kwantitatif yang melekat pada

setiap indicator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategik maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir tahun periode pelaksanaan.

Rencana Kinerja tahun 2021 ini merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik – baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktifitas operasional Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat sepenuhnya dapat dirujukkan pada Rencana Kinerja 2017 ini.

Sasaran strategik tahun 2021, indikator kinerja dan target dapat disajikan pada table berikut ini :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | SASARAN STRATEGIK | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
| 1. | 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah  2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunangan ASN  2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  2.06.01 Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor  2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan  2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi  2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan  2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 12 Bulan  12 Bulan  12 Bulan  12 Bulan  12 Bulan  12 Bulan  12 Bulan  12 Bulan  12 Bulan  2 Unit  12 Bulan  12 Bulan  12 Bulan  12 Bulan |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2.2.01  Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 2.2.01.04  Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 3 Kegiatan |
| 3. | 3.2.01  Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik | 3.2.01.03  Pelaksanaan Kebijakan di Bidag Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 1 Kegiatan |
| 4. | 4.2.01  Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | 4.2.01.05  Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 1 Kegiatan |
| 5. | 5.2.01  Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | 5.2.01.03  Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah  5.2.01.04  Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah. | 1 Kegiatan  1 Kegiatan |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | 6.2.01  Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | 6.2.01.04  Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah  6.2.01.05  Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing , Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penaganan Konflik di Daerah. | 2 Kegiatan  3 Kegiatan |

# BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 2021

1. **ORGANISASI CAPAIAN KINERJA 2021**

Pengukuran capaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Langkat tahun 2019 di ukur digunakan untuk mengetahui keberhasilan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Langkat dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran, Indikator Kinerja yang di gunakan adalah indikator kinerja sasaran yang di rumuskan dalam rencana strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Langkat tahun 2019-2024.

Sedangkan capaian indikator kinerja sasaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Langkat merupakan tingkat pencapaian target dari indikator kinerja sasaran yang dicapai pada tahun 2021, diukur dengan membandingkan nilai indikator kinerja sasaran antara realisasi dengan target yang di tampilkan dalam bentuk persentase (%). Hasil pengukuran kinerja sasaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Langkat.

Dari beberapa sasaran yang telah tercapai tersebut, masih terdapat perbedaan dengan kondisi yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini terlihat pada indicator kinerja yang digunakan pada pencapaian sasaran ini adalah pada tingkat output, sedang yang diharapkan masyarakat adalah pada tingkat outcome. Penyebabnya adalah organisasi belum mampu secara tegas mendefenisikan indicator kinerja outcomes untuk seluruh sasaran yang ada dan sesuai dengan kondisi yang diharapkan masyarakat.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan methode pembanding capaian kinerja sasaran. Methode pembanding capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadi celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Methode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak – pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

# ANALISIS ATAS PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIK 2021

Secara umum, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dari 5 (lima) sasaran yang telah ditetapkan pada Tahun 2021 telah dilaksanakan semua sasaran, namun tingkat keberhasilannya sudah diwujudkan secara optimal.

Rincian analisis capaian masing – masing **sasaran** dapat diuraikan sebagai

berikut :

# Terselengaranya Pelayanan Efektif dan Efisien.

Indikator keberhasilan sasaran **“Terselengaranya pelayanan efektif dan efisien“,** berikut target dan capaiannya sebagai berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indikator kinerja** | **Target** | **Realisasi** | **%** |
| 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3. Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/   Penerangan Bangunan Kantor   1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan   8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-  Undangan  9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan  Konsultasi   1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   11. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air  dan Listrik  12. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  13. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya  Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kenderaan  Dinas Operasional atau Lapangan  14. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 12 Bulan  12 Bulan  12 Bulan  12 Bulan  12 Bulan  12 Bulan  12 Bulan  12 Bulan  12 Bulan  12 Bulan  12 Bulan  12 Bulan  12 Bulan  12 Bulan | 12 Bulan  12 Bulan  12 Bulan  12 Bulan  12 Bulan  12 Bulan  12 Bulan  12 Bulan  12 Bulan  12 Bulan  12 Bulan  12 Bulan  12 Bulan  12 Bulan | 100 %  100 %  100 %  100 %  100 %  100 %  100 %  100 %  100 %  100 %  100 %  100 %  100 %  100 % |

Untuk menunjang keberhasilan sasaran tersebut Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat menerapkan kebijakan *“Mendorong Penerapan Pelayanan Secara Efektif dan Efisien“* untuk melaksanakan program *“Penerapan Pelayanan Efektif dan Efisien“* dengan kegiatan strategik :

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator kinerja kegiatan digunakan untuk menganalisis “Tingkat Efisiensi“ dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi sehingga didapat data nilai output perunit yang dihasilkan. Demikian juga dalam menganalisis “Tingkat Efektifitas“ dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi capaian indicator outcomes.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Program/Kegiatan | | | Analisis Efisiensi ( Output/Input ) | | Tingkat Efisiensi  % | Analisis Efektifitas  (indikator kinerja outcomes) | |
| Anggaran | Realisasi | Target | Realisasi |
| Pagu Keseluruhan | | | 4.484.913.540 | 4.200.196.022 | 93,65% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | 2.459.926.931 | 2.222.902.584 | 90,36% |  |  |
|  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 1.837.819.552 | 1.662.351.663 | 90,45% |  |  |
|  |  | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN | 1.785.439.552 | 1.620.951.663 | 90,79% | 12 Bulan | 12 Bulan |
|  |  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 52.380.000 | 41.400.000 | 79,04% | 12 Bulan | 12 Bulan |
|  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | 0 | 0 | 0,00% |  |  |
|  |  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 0 | 0 | 0,00% | 12 Bulan | 12 Bulan |
|  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 192.981.679 | 192.499.900 | 99,75% |  |  |
|  |  | Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5.914.154 | 5.902.200 | 99,80% | 12 Bulan | 12 Bulan |
|  |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 17.129.313 | 17.123.700 | 99,97% | 12 Bulan | 12 Bulan |
|  |  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 7.943.194 | 7.737.500 | 97,41% | 12 Bulan | 12 Bulan |
|  |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 45.250.000 | 45.210.000 | 99,91% | 12 Bulan | 12 Bulan |
|  |  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 18.058.180 | 18.057.900 | 100,00% | 12 Bulan | 12 Bulan |
|  |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 12.000.000 | 12.000.000 | 100,00% | 12 Bulan | 12 Bulan |
|  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 86.686.838 | 86.468.600 | 99,75% | 12 Bulan | 12 Bulan |
|  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 35.000.000 | 35.000.000 | 100,00% |  |  |
|  |  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 35.000.000 | 35.000.000 | 100,00% | 12 Bulan | 12 Bulan |
|  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 221.438.800 | 198.098.531 | 89,46% |  |  |
|  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 62.188.800 | 42.598.531 | 68,50% | 12 Bulan | 12 Bulan |
|  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 159.250.000 | 155.500.000 | 97,65% | 12 Bulan | 12 Bulan |
|  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 172.686.900 | 134.952.490 | 78,15% |  |  |
|  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan | 166.686.900 | 129.052.490 | 77,42% | 12 Bulan | 12 Bulan |
|  |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 6.000.000 | 5.900.000 | 98,33% | 12 Bulan | 12 Bulan |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | | | 499.900.476 | 491.218.900 | 98,26% |  |  |
|  | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | | 499.900.476 | 491.218.900 | 98,26% |  |  |
|  |  | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa Pembauaran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 499.900.476 | 491.218.900 | 98,26% | 3 Kegiatan | 3 Kegiatan |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | | | 908.565.166 | 908.353.738 | 99,98% |  |  |
|  | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Polotik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik | | 908.565.166 | 908.353.738 | 99,98% |  |  |
|  |  | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 908.565.166 | 908.353.738 | 99,98% | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat | | | 55.069.510 | 54.175.750 | 98,38% |  |  |
|  | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | | 55.069.510 | 54.175.750 | 98,38% |  |  |
|  |  | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 55.069.510 | 54.175.750 | 98,38% | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | | | 140.771.014 | 128.404.450 | 91,22% |  |  |
|  | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | | 140.771.014 | 128.404.450 | 91,22% |  |  |
|  |  | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah | 24.999.881 | 18.059.650 | 72,24% | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan |
|  |  | Pelaksanna Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 115.771.133 | 110.344.800 | 95,31% | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | | | 420.680.443 | 395.140.600 | 93,93% |  |  |
|  | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | | 420.680.443 | 395.140.600 | 93,93% |  |  |
|  |  | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik di Daerah | 263.703.606 | 261.201.000 | 99,05% | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan |
|  |  | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Daerah | 156.976.837 | 133.939.600 | 85,32% | 3 Kegiatan | 3 Kegiatan |

Dari data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan – kegiatan tersebut dalam menunjang keberhasilan program kerja cukup berhasil.

Secara umum manfaat yang diharapkan dari sasaran ini adalah memperlancar aktifitas kerja dan pengadministrasian kantor.

Dalam jangka panjang dampak yang diharapkan adalah pengadministrasian menggunakan sistem komputerisasi yang dilengkapi program aplikasi sesuai dengan kebutuhan.

# 2. Terciptanya Kehidupan IPOLEKSOSBUD yang Sehat, Stabil dan Dinamis

Indikator keberhasilan sasaran **“Terciptanya Kehidupan IPOLEKSOS BUD yang Sehat, Stabil dan Dinamis“,** berikut target dan capaiannya sebagai berikut

:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indikator kinerja** | **Target** | **Realisasi** | **%** |
| 1. Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa se-Kab Langkat | 1 kali | 1 kali | 100 |
| 2. Tertibnya Penelitian, pemeriksaan persyaratan administrasi, Pengajuan penyerahan dan Bantuan kepada Parpol. | 1 kali | 1 kali | 100 |
| 3. Pemantau Politik di Daerah Dalam Rangka Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden. | 1 kali | 1 kali | 100 |

Untuk menunjang keberhasilan sasaran tersebut Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat menerapkan kebijakan ***”Mengembangkan Kondisi IPOLEKSOSBUD yang Sehat, Stabil dan Dinamis “*** untuk melaksanakan program *“Peningkatan Kondisi IPOLEKSOSBUD yang Sehat, Stabil dan Dinamis”* dengan kegiatan strategik :

1. Melaksanakan Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa se-Kab Langkat
2. Melaksanakan penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi, pengajuan, penyerahan dan bantuan kepada Parpol
3. Pemantau Politik di Daerah Dalam Rangka Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Pendidikan dan Pelatihan Formal.
4. Pertemuan Orkemas se Kabupaten Langkat.

Indikator kinerja kegiatan digunakan untuk menganalisis “Tingkat Efisiensi“ dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi sehingga didapat data nilai output perunit yang dihasilkan. Demikian juga dalam menganalisis “Tingkat Efektifitas“ dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi capaian indikator outcomes

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kegiatan | Analisis Efisinesi ( Output/Input ) | | Tingkat Efisiensi | Analisis Efektifitas ( indikator kinerja outcomes ) | | Tingkat Efektifitas |
| Anggaran | Realisasi | % | Target | Realisasi | % |
| 1. Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten,  Kecamatan, Kel dan Desa. | 268.206.400 | 260.401.300 | 97,09 | Orang | Orang | 100 |
| 2. Penelitian, pemeriksaan persyaratan administrasi, pengajuan, penyerahan dan  bantuan kepada parpol. | 50.163.700 | 50.163.700 | 100 | Parpol | Parpol | 100 |
| 3. Pertemuan Orkemas se Kabupaten Langkat | 53.189.088 | 49.459.088 | 92,99 | Orang | Orang | 100 |

Dari data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan – kegiatan tersebut dalam menunjang keberhasilan program kerja cukup berhasil.

Secara umum manfaat yang diharapkan dari sasaran ini adalah lembaga/ organisasi yang ada di masyarakat dalam menjalankan aktifitasnya harus sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.

Dalam jangka panjang dampak yang diharapkan adalah lembaga/ organisasi berpartisipasi aktif dalam mendukung stabilitas daerahnya.

Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja tahun 2020 adalah lembaga/ organisasi belum seluruhnya memahami peraturan dan perundangan yang berlaku.

Langkah – langkah yang perlu diambil untuk pemecahan masalah tersebut adalah memfasilitasi lembaga/ organisasi tentang peraturan dan perundangan – undangan.

# 3. Terwujudnya Partisipasi Seluruh Komponen Masyarakat Dalam Memelihara Integritas Bangsa.

Indikator keberhasilan sasaran **“Terwujudnya Partisipasi Seluruh Komponen Masyarakat Dalam Memelihara Integritas Bangsa“,** berikut target dan capaiannya sebagai berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indikator kinerja** | **Target** | **Realisasi** | **%** |
| 1. Pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan ( FPK ) Kabupaten Langkat dan Kecamatan se-Kab. Langkat | 1 kali | 1 kali | 100 |
| 2. Peningkatan toleransi dan Pemberdayaan FKUB Kab. Langkat | 1 kali | 1 kali | 100 |
| 3. Satgas Pemberantasan dan P4GN Kabupaten | 1 kali | 1 kali | 100 |

Untuk menunjang keberhasilan sasaran tersebut Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat menerapkan kebijakan *“*Mewujudkan Partisipasi Seluruh Komponen Masyarakat Dalam Memelihara Integritas Bangsa *“* untuk melaksanakan program *“*Peningkatan Partisipasi Seluruh Komponen Masyarakat Dalam Memelihara Integritas Bangsa *“* dengan kegiatan strategik :

1. Melaksanakan Pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Langkat dan Kecamatan se-Kab. Langkat.
2. Melaksanakan Peningkatan toleransi dan Pemberdayaan FKUB Kab. Langkat.
3. Melaksanakan Satgas pemberantasan dan P4GN Kabupaten Langkat.
4. Melaksanakan Pencegahan, Penanggulangan, Penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba terhadap masyarakat.

Indikator kinerja kegiatan digunakan untuk menganalisis “Tingkat Efisiensi“ dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi sehingga didapat data nilai output perunit yang dihasilkan. Demikian juga dalam menganalisis “Tingkat Efektifitas“ dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi capaian indikator outcomes.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kegiatan | Analisis Efisinesi ( Output/Input ) | | Tingkat Efisiensi | Analisis Efektifitas ( indikator kinerja outcomes ) | | Tingkat Efektifi tas |
| Anggaran | Realisasi | % | Target | Realisasi | % |
| 1. Pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kab. Langkat dan Kecamatan | 174.678.779 | 172.525.400 | 98,77 |  |  | 100 |
| 2. Peningkatan Toleransi dan Pemberdayaan FKUB Kab.  Langkat. | 178.987.000 | 176.948.000 | 98,86 |  |  | 100 |
| 3. Satgas  Pemberantasan dan P4GN Kabupaten | 119.259.750 | 117.761.750 | 98,74 |  |  | 100 |

Dari data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan – kegiatan tersebut dalam menunjang keberhasilan program kerja cukup berhasil.

Secara umum manfaat yang diharapkan dari sasaran ini adalah bertambah kepedulian masyarakat terhadap integritas daerah.

Dalam jangka panjang dampak yang diharapkan adalah tumbuhnya kelompok maupun pembela integritas daerah secara suka rela.

# Terwujudnya Rasa Aman dan Tertib dalam masyarakat

Indikator keberhasilan sasaran **“Terwujudnya Rasa Aman dan Tertib dalam masyarakat “,** berikut target dan capaiannya sebagai berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indikator kinerja** | **Target** | **Realisasi** | **%** |
| 1. Hari Bela Negara | 1 kali | 1 kali | 100 |

Untuk menunjang keberhasilan sasaran tersebut Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat menerapkan kebijakan *“*Terwujudnya Rasa Aman dan Tertib dalam masyarakat *“* untuk melaksanakan program *“*Rasa Aman dan Tertib dalam masyarakat *“* dengan kegiatan strategik :

* 1. Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.

Indikator kinerja kegiatan digunakan untuk menganalisis “Tingkat Efisiensi“ dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi sehingga didapat data nilai output perunit yang dihasilkan. Demikian juga dalam menganalisis “Tingkat Efektifitas“ dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi capaian indikator outcomes.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kegiatan | Analisis Efisinesi ( Output/Input ) | | Tingkat Efisiensi | Analisis Efektifitas ( indikator kinerja outcomes ) | | Tingkat Efektifi tas |
| Anggaran | Realisasi | % | Target | Realisasi | % |
| 1. Hari Bela Negara | 8.027.000 | 1.777.000 | 22,14 |  |  | 100 |

# ANALISIS ATAS CAPAIAN KEUANGAN 2021

Anggaran dan realisasi Pengeluaran untuk mewujudkan berbagai sasaran di atas adalah sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM/KEGIATAN** | | | **PAGU ANGGARAN** | **REALISASI** | **%** | **SISA PAGU ANGGARAN** |
| **Pagu Keseluruhan** | | | **4.484.913.540** | **4.200.196.022** | **93,65%** | **284.717.518** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | | | **2.459.926.931** | **2.222.902.584** | **90,36%** | **237.024.347** |
|  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | **1.837.819.552** | **1.662.351.663** | **90,45%** | **175.467.889** |
|  |  | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN | 1.785.439.552 | 1.620.951.663 | 90,79% | 164.487.889 |
|  |  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 52.380.000 | 41.400.000 | 79,04% | 10.980.000 |
|  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | **0** | **0** | **0,00%** | **0** |
|  |  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 0 | 0 | 0,00% | **0** |
|  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | **192.981.679** | **192.499.900** | **99,75%** | **481.779** |
|  |  | Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5.914.154 | 5.902.200 | 99,80% | 11.954 |
|  |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 17.129.313 | 17.123.700 | 99,97% | 5.613 |
|  |  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 7.943.194 | 7.737.500 | 97,41% | 205.694 |
|  |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 45.250.000 | 45.210.000 | 99,91% | 40.000 |
|  |  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 18.058.180 | 18.057.900 | 100,00% | 280 |
|  |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 12.000.000 | 12.000.000 | 100,00% | 0 |
|  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 86.686.838 | 86.468.600 | 99,75% | 218.238 |
|  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | **35.000.000** | **35.000.000** | **100,00%** | **0** |
|  |  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 35.000.000 | 35.000.000 | 100,00% | 0 |
|  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | **221.438.800** | **198.098.531** | **89,46%** | **23.340.269** |
|  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 62.188.800 | 42.598.531 | 68,50% | 19.590.269 |
|  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 159.250.000 | 155.500.000 | 97,65% | 3.750.000 |
|  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | **172.686.900** | **134.952.490** | **78,15%** | **37.734.410** |
|  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan | 166.686.900 | 129.052.490 | 77,42% | 37.634.410 |
|  |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 6.000.000 | 5.900.000 | 98,33% | 100.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan** | | | **499.900.476** | **491.218.900** | **98,26%** | **8.681.576** |
|  | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | | **499.900.476** | **491.218.900** | **98,26%** | **8.681.576** |
|  |  | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa Pembauaran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 499.900.476 | 491.218.900 | 98,26% | 8.681.576 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik** | | | **908.565.166** | **908.353.738** | **99,98%** | **211.428** |
|  | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Polotik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik | | **908.565.166** | **908.353.738** | **99,98%** | **211.428** |
|  |  | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 908.565.166 | 908.353.738 | 99,98% | 211.428 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat** | | | **55.069.510** | **54.175.750** | **98,38%** | **893.760** |
|  | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | | **55.069.510** | **54.175.750** | **98,38%** | **893.760** |
|  |  | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 55.069.510 | 54.175.750 | 98,38% | 893.760 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya** | | | **140.771.014** | **128.404.450** | **91,22%** | **12.366.564** |
|  | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | | **140.771.014** | **128.404.450** | **91,22%** | **12.366.564** |
|  |  | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah | 24.999.881 | 18.059.650 | 72,24% | 6.940.231 |
|  |  | Pelaksanna Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 115.771.133 | 110.344.800 | 95,31% | 5.426.333 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial** | | | **420.680.443** | **395.140.600** | **93,93%** | **25.539.843** |
|  | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | | **420.680.443** | **395.140.600** | **93,93%** | **25.539.843** |
|  |  | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik di Daerah | 263.703.606 | 261.201.000 | 99,05% | 2.502.606 |
|  |  | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Daerah | 156.976.837 | 133.939.600 | 85,32% | 23.037.237 |

Realisasi pengeluaran dinas bila dibandingkan antara Tahun 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM/KEGIATAN** | | | **PAGU ANGGARAN**  **2020** | **PAGU ANGGARAN 2021** |
| **Pagu Keseluruhan** | | | **3.700.783.470** | **4.484.913.540** |
|  |  |  |  |  |
| **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | | | **2.609.124.418** | **2.459.926.931** |
|  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | **1.943.833.000** | **1.837.819.552** |
|  |  | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN | 1.880.693.000 | 1.785.439.552 |
|  |  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 63.140.000 | 52.380.000 |
|  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | **260.235.718** | **192.981.679** |
|  |  | Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5.915.900 | 5.914.154 |
|  |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 5.440.000 | 17.129.313 |
|  |  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 7.943.358 | 7.943.194 |
|  |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 43.494.000 | 45.250.000 |
|  |  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 35.187.575 | 18.058.180 |
|  |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 18.000.000 | 12.000.000 |
|  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 144.254.885 | 86.686.838 |
|  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | **19.850.000** | **35.000.000** |
|  |  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 19.850.000 | 35.000.000 |
|  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | **185.568.800** | **221.438.800** |
|  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 62.068.800 | 62.188.800 |
|  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 123.500.000 | 159.250.000 |
|  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | **145.636.900** | **172.686.900** |
|  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan | 139.636.900 | 166.686.900 |
|  |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 6.000.0000 | 6.000.000 |
|  |  |  |  |  |
| **Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan** | | | **182.705.779** | **499.900.476** |
|  | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | | **182.705.779** | **499.900.476** |
|  |  | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa Pembauaran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 182.705.779 | 499.900.476 |
|  |  |  |  |  |
| **Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik** | | | **130.850.988** | **908.565.166** |
|  | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Polotik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik | | **130.850.988** | **908.565.166** |
|  |  | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 130.850.988 | 908.565.166 |
|  |  |  |  |  |
| **Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat** | | | **39.865.600** | **55.069.510** |
|  | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | | **39.865.600** | **55.069.510** |
|  |  | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 39.865.600 | 55.069.510 |
|  |  |  |  |  |
| **Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya** | | | **178.987.000** | **140.771.014** |
|  | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | | **178.987.000** | **140.771.014** |
|  |  | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah | 0 | 24.999.881 |
|  |  | Pelaksanna Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 178.987.000 | 115.771.133 |
|  |  |  |  |  |
| **Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial** | | | **559.249.685** | **420.680.443** |
|  | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | | **559.249.685** | **420.680.443** |
|  |  | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik di Daerah | 268.206.400 | 263.703.606 |
|  |  | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Daerah | 291.043.285 | 156.976.837 |

Dari data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan – kegiatan tersebut dalam menunjang keberhasilan program kerja cukup berhasil.

Secara umum manfaat yang diharapkan dari sasaran ini adalah memperlancar aktifitas kerja dan pengadministrasian kantor.

Dalam jangka panjang dampak yang diharapkan adalah pengadministrasian menggunakan sistem komputerisasi yang dilengkapi program aplikasi sesuai dengan kebutuhan.

# STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Keberhasilan pencapaian sasaran stratejik Tahun 2019 telah memberi kontribusi dalam pencapaian tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat Tahun 2019 - 2024. Namun demikian tidak dapat dipungkiri dengan kompleksnya dimensi, ruang lingkup, fungsi dan aspek pengelolaan Pemerintahan serta pembangunan kota, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat tetap dihadapkan pada berbagai masalah dan tantangan pembangunan perkotaan yang harus diupayakan pemecahannya. Berbagai masalah dan langkah antisipatif yang telah diambil telah diuraikan pada bab terdahulu.

Sehubungan dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada periode Renstra Tahun 2019 - 2024, serta upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasinya dirumuskan strategi yang akan diambil antara lain tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai.

# BAB IV PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab – bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja tahun 2021, yakni :

* 1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah yang diamanatkan oleh Bupati Langkat telah dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya.
  2. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat bersama–sama dengan jajarannya telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam meningkatkan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diamanatkan Perda.
  3. Ukuran keberhasilan ataupun kinerja atas pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewajiban seperti yang disebut pada point 1 dan 2 dapat diperoleh dari data – data indikator kinerja.
  4. Dalam capaian sasaran makro dari sasaran strategik yang ditetapkan, telah dilaksanakan, namun tingkat keberhasilan dari beberapa sasaran telah berhasil diwujudkan secara optimal. Kekurang berhasilan dari beberapa sasaran lebih disebabkan pada ketidak jelasan peraturan yang melandasinya maupun pada adanya perubahan kondisi dilapangan dari kondisi yang telah diperhitungkan dalam proses perencanaan.
  5. Dari beberapa sasaran yang telah tercapai tersebut, masih terdapat perbedaan dengan kondisi yang diharapkan masyarakat. Hal ini terlihat pada indikator kinerja yang digunakan pada pencapaian sasaran ini adalah pada tingkat output, sedang yang diharapkan masyarakat pada tingkat outcome. Penyebabnya adalah organisasi belum secara tegas mendefenisikan indikator kinerja outcome untuk seluruh sasaran yang ada dan sesuai dengan kondisi yang diharapkan masyarakat. Dalam tahun mendatang tentunya akan dirumuskan lagi indikator keberhasilan yang menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat ini tidak terlepas dari kekurangan, untuk itu kami sangat mengharapkan saran, keritik untuk menyempurnakan dimasa yang akan datang dan atas segala perhatian diucapkan terima kasih.

Stabat, 2022

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN LANGKAT

FAISAL BADAWI. S.Sos

PEMBINA

NIP. 19730518 200604 1 003

PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

INSTANSI : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. LANGKAT

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM** | **K E G I A T A** | | | | **N** | | **PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET** | **KET.** |
| **URAIAN** | **INDIKATOR KINERJA** | | **SATUAN** | **TARGET** | **REALISASI** |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1. Pelayanan Adminis trasi Perkantora n | 1. Melaksanakan Penyediaan jasa komu-  nikasi, sumber daya Air dan Listrik. | ( I )  (OP) | Dana yang tersedia.  Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Air dan Listrik. | Rp. Kali | 62.068.800,-  1 | 49.334.676,-  1 | 79,48%  100 | APBD |
|  | (OC) | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya Air dan Listrik. | Bulan | 12 | 12 | 100 |  |
|  | 2. Melaksanakan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasion al. | ( I ) | Dana yang tersedia. | Rp. | 3.200.000,- | 1.986.190,- | 62,07 | APBD |
| (OP) | Terlaksananya penyediaan jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional. | Kali | 1 | 1 | 100 |  |
| (OC) | Tersedianya jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan  Dinas/ Operasional. | Kali | 1 | 1 | 100 |  |
|  | 3. Melaksanakan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | ( I ) | Dana yang tersedia. | Rp. | 6.000.000,- | 5.980.000,- | 99,67 % | APBD |
| (OP) | Terlaksananya Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Kali | 1 | 1 | 100 |  |
| (OC) | Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | kali | 1 | 1 | 100 |  |
|  | 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor. | ( I ) Dana yang tersedia.  (OP) Terlaksananya  Penyediaan Alat Tulis Kantor.  (OC) Tersedianya Alat Tulis Kantor. | | Rp. | 17.129.375,- | 17.097.750,- | 99,71 | APBD |
| Kali | 1 | 1 | 100 |  |
| bulan | 12 | 12 | 100 |  |
|  | 5. Melaksanakan Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan. | ( I ) Dana yang tersedia. | | Rp. | 18.058.200,- | 17.987.600,- | 99,61% | APBD |
| (OP) Terlaksananya  Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan | | Kali | 1 | 1 | 100 |  |
| (OC) Tersedianya Barang Cetakan & Penggandaan | | Paket | 1 | 1 | 100 |  |
|  | 6. Melaksanakan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor. | ( I ) Dana yang tersedia. | | Rp. | 5.915.900,- | 5.908.000,- | 99,87% | APBD |
| (OP) Terlaksananya  penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor. | | Kali | 1 | 1 | 100 |  |
| (OC) Tersedianya  Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor. | |  |  |  |  |  |
|  | | Paket | 1 | 1 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7. penyediaan Peralatan Rumah Tangga. | ( I ) Dana yang tersedia.  (OP) Terlaksananya  penyediaan Peralatan Rumah Tangga.  (OC) Tersedianya  Peralatan Rumah Tangga. | Rp. Kali  Paket | 7.943.358,-  1  1 | 7.900.000,-  1  1 | 99,45%  100  100 | APBD |
|  | 8. Melaksanakan Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang- undangan. | ( I ) Dana yang tersedia.  (OP) Terlaksananya  penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang- undangan.  (OC) Tersedianya Bahan Bacaan & Peraturan Perundang- undangan. | Rp. Keg.  Expl. | 18.000.000,-  1  1 | 18.000.000,-  1  1 | 100,00 %  100  100 | APBD |
|  | 9. Melaksanakan Penyediaan Makanan & Minuman. | ( I ) Dana yang tersedia.  (OP) Terlaksananya  Penyediaan Makanan & Minuman.  (OC) Terpenuhinya  Makanan & Minuman. | Rp. Bln  Paket | 25.494.000,-  11  1 | 25.490.000,-  11  1 | 99,98 %  100  100 | APBD |
|  | 10. Melaksanakan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | ( I ) Dana yang tersedia.  (OP) Terlaksananya Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah  (OC) Terpenuhinya  Koordinasi dan Konsultasi Keluar  Daerah | Rp. Kali  Orang | 144.254.885,-  1  1 | 143.881.800,-  1  1 | 99,74%  100  100 | APBD |
|  | 11. Penyediaan Jasa Administrasi Umum | ( I ) Dana yang tersedia.  (OP) Terlaksananya  penyediaan jasa adm. umum.  (OC) Tersedianya jasa adm. umum. | Rp. Kali  Orang | 204.640.000,-  1  1 | 196.920.000,-  1  1 | 96,23%  100  100 | APBD |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1 . Pengadaan  Peralatan Gedung Kantor | ( I ) Dana yang tersedia.  (OP) Terlaksananya  Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Rp. Kali | 19.850.000,-  1 | 19850.000,-  1 | 100%  100 | APBD |
|  | (OC) Tersedianya  Perlengkapan  Gedung Kantor | Unit | 1 | 1 | 100 |  |
|  | 2. Pengadaan Meubeleur | ( I ) Dana yang | Rp | 10.000.000,- | 9.600.000,- | 96% | APBD |
|  | tersedia |  |  |  |  |  |
|  | (OP) Terlaksananya | Kali | 1 | 1 |  |  |
|  | Penggadaan |  |  |  |  |  |
|  | Peralatan dan |  |  |  |  |  |
|  | Mesin – |  |  |  |  |  |
|  | Pengadaan |  |  |  |  |  |
|  | Sofa |  |  |  |  |  |
|  | (Oc) Tersedianya | Unit | 1 | 1 |  |  |
|  | Peralatan dan |  |  |  |  |  |
|  | Mesin – |  |  |  |  |  |
|  | Pengadaan |  |  |  |  |  |
|  | Meja Rapat |  |  |  |  |  |
|  | 3. Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan  Dinas/Operasional | ( I ) Dana yang tersedia | Rp | 136.436.900,- | 117.200.550,- | 85,90% | APBD |
|  | (OP) Terlaksananya  Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan Dinas/Operasio nal  (OC) Terawatnya  Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan  Dinas/Operasio nal | Kali  Paket | 1  1 | 1  1 | 100  100 |  |
|  | 4. Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Kantor | ( I ) Dana yang tersedia | Rp | 5.440.000,- | 5.431.000,- | 99,83 % | APBD |
| (OP) Terlaksananya  Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Kantor | Kali | 1 | 1 | 100 |  |
| (OC) Tersedianya  Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Kantor | Kali | 1 | 1 | 100 |  |
| 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan | ( I ) Dana yang tersedia  (OP) Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan  (OC) Tertingkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur  . | Rp Kali  Orang | 15.125.000,-  1  1 | 15.125.000  1  1 | 100 %  100  100 | APBD |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | ( I ) Dana yang tersedia | Rp | 21.050.000,- | 21.050.000 | 100 % | APBD |
|  |  |  | 1 |  |  |
| (OP) Terlaksananya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu  (OC) Tertingkatnya Kapasitas  Sumber Daya Aparatur | Kali  Orang | 1  1 | 1 | 100  100 |  |
| 4. Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal | 1. Melaksanakan Peringatan Hari Bela Negara | ( I ) Dana yang tersedia  (OP) Terlaksananya  Peringatan Hari Bela Negara. | Rp Kali | 8.027.000,-  1 | 1.777.000,-  1 | 22,14 %  100 | APBD |
|  | (OC) Tertingkatnya  Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan  Tindak Kriminal. | Orang | 1 | 1 | 100 |  |
|  | 2. Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Masyarakat Tingkat Kabupaten Langkat | ( I ) Dana yang tersedia | Rp | 39.865.600,- | 37.295.600,- | 93.55 % | APBD |
| (OP) Terlaksananya  Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Masyarakat Tingkat Kabupaten Langkat | Kali  Orang | 1  1 | 1  1 | 100  100 |  |
| (OC) Tertingkatnya  Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak  Kriminal. |  |  |  |  |  |
| 5.  Pengembanga n Wawasan Kebangsaan | 1. Melaksanakan Pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Langkat dan Kecamatan se- Kab.Langkat | ( I ) Dana yang tersedia.  (OP)  Terlaksanany a Pemberdayaa n Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Langkat dan Kecamatan se- Kab.Langkat | Rp. Keg. | 174.678.779,-  1 | 172.525.400,-  1 | 98,77 %  100 | APBD |
|  | (OC) Terpenuhinya  Pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Langkat dan Kecamatan se- Kab.Langkat | Kali | 1 | 1 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2. Melaksanakan Satgas Pemberantasan dan P4GN Kabupaten Langkat | ( I ) Dana yang tersedia  (OP) Terlaksananya Satgas Pemberantasan dan P4GN Kabupaten Langkat  (OC) Terpenuhinya Satgas Pemberantasan dan P4GN Kabupaten  Langkat | Rp. Kali  Orang | 119.259.750,-  1  1 | 117.761.750,-  1  1 | 98,74%  100  100 | APBD |
|  | 3. Melaksanakan Peningkatan Toleransi dan Pemberdayaan FKUB Kabupaten Langkat | ( I ) Dana yang tersedia.  (OP)  Terlaksanany a Peningkatan Toleransi dan Pemberdayaa n FKUB  Kabupaten Langkat  (OC) Terpenuhinya  Peningkatan Toleransi dan Pemberdayaan FKUB  Kabupaten Langkat | Rp. kali  kali | 178.987.000,-  1  1 | 176.948.000,-  1  1 | 98,86%  100  100 | APBD |
|  | 4. Pencegahan, Penanggulangan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Terhadap Masyarakat | ( I ) Dana yang tersedia  (OP) Terlaksananya Pencegahan, Penanggulangan  ,  Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Terhadap Masyarakat  (OC) Terpenuhinya  Pencegahan, Penanggulanga n, Penyalahgunaa n dan Peredaran Gelap Narkoba  Terhadap Masyarakat | Rp. Kali  Orang | 16.989.500,-  1  1 | 15.989.500,-  1  1 | 94,11%  100  100 | APBD |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan | 1. Melaksanakan Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa se- Kab. Langkat | ( I ) Dana yang tersedia.  (OP) Terlaksananya  Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Des a se-Kab.  Langkat  (OC) Terpenuhinya  Pemberdayaa n Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/D esa se-Kab. Langkat | Rp. kali  Orang | 268.206.400,-  1  1 | 260.401.300,-  1  1 | 97,09 %  100  100 | APBD |
| 7. Pendidikan Politik Masyarakat | 1. Penelitian, Pemeriksaan Persyaratan Administrasi, Pengajuan, Penyerahan dan Bantuan Kepada Parpol. | ( I ) Dana yang tersedia.  (OP) Terlaksananya  Penelitian, pemeriksaan Persyaratan Administrasi, Pengajuan, Penyerahan dan bantuan Kepada parpol  (OC) Terpenuhinya Penelitian, pemeriksaan Persyaratan Administrasi, Pengajuan, Penyerahan dan bantuan Kepada parpol | Rp. kali  Orang | 50.163.700,-  1  1 | 50.163.700,-  1  1 | 100,00%  100  100 | APBD |
|  | 2. Melaksanakan Pembentukan Tim Terpadu penanganan Komplik Sosial Kab.Langkat | ( I ) Dana yang tersedia.  (OP) Terlaksananya  Pembentukan Tim Terpadu penanganan Konplik Sosial Kab.Langkat  (OC) Terpenuhinya  Pembentukan Tim Terpadu penanganan Konplik Sosial  Kab.Langkat | Rp. kali  Orang | 154.794.035,-  1  1 | 150.822.798  1  1 | 97,43 %  100  100 | APBD |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 . Tim Pemantau Perkembangan Politik di Daerah | ( I ) Dana yang tersedia.  (OP) Terlaksananya  Tim Pemantau Perkembangan Politik di Daerah  (OC) Terpenuhinya  Tim Pemantau Perkembangan Politik di Daerah | Rp. kali  Orang | 4.420.750,-  1  1 | 4.387.750,-  1  1 | 99,25%  100  100 | APBD |
|  | 4. Pertemuan Orkemas Se-Kabupaten Langkat | ( I ) Dana yang tersedia.  (OP) Terlaksananya  Pertemuan Orkemas Se- Kabupaten Langkat  (OC) Terpenuhinya Pertemuan Orkemas Se- Kabupaten Langkat | Rp. kali  Orang | 53.189.088,-  1  1 | 49.459.088,-  1  1 | 92,99%  100  100 | APBD |
|  | 5. Sosialisasi Kepada Partai Politik | ( I ) Dana yang tersedia.  (OP) Terlaksananya  Sosialisasi Kepada Partai Politik  (OC) Terpenuhinya Sosialisasi Kepada Partai Politik | Rp. kali  Orang | 23.077.450,-  1  1 | 22.077.450,-  1  1 | 95,67%  100  100 | APBD |

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2020 INSTANSI : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. LANGKAT

Form PPS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SASARAN** | **INDIKATOR CAPAIAN SASARAN** | **TARGET** | **REALISASI** | **PERSENTASE**  **PENCAPAIAN TARGET** | **KET** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** |
| 1.1. Terlaksananya pelayanan | * + 1. Tersedianya Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik     2. Tersedianya jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional     3. Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja     4. Terpenuhinya alat tulis kantor     5. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan     6. Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor     7. Tersedianya Peralatan rumah tangga     8. Tersedianya Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan     9. Terpenuhinya makanan dan minuman     10. Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah     11. Terlaksananya jasa adm. Umum. | 12 bln | 12 bln | 100 |  |
| Administrasi Perkantoran |  |  |  |
|  | 2 Unit | 2 Unit | 100 |
|  | 12 bln | 12 bln | 100 |
|  | 12 bln | 12 bln | 100 |
|  | 1 paket | 1 paket | 100 |
|  | 1 paket | 1 paket | 100 |
|  | 1 paket | 1 paket | 100 |
|  | Expl | Expl | 100 |
|  | Gelas | Gelas | 100 |
|  | orang | orang | 100 |
|  | orang | orang | 100 |
| 2.1. Tertingkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur. | * + 1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor     2. Pengadaan Meubleur   i. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kedaraan Dinas/ Oprasional  2.1.4 Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Kantor | 1 Paket | 1 Paket | 100 |  |
|  | 1 Paket | 1 Paket | 100 |
|  | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 |
|  | 4 Paket | 4 Paket | 100 |
| 3.1 Peningkatan Disiplin Aparatur | * + 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya     2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | 1 Paket | 1 Paket | 100 |  |
|  | 1 Paket | 1 Paket | 100 |
| 4.1 Terpeliharanya Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal | 4.1.1. Hari Bela Negara  4.1.2 Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Masyarakat Tingkat Kabupaten Langkat | 1 Kali  3 Kali | 1 Kali  3 Kali | 100  100 |  |
| 5.1 Pengembangan Wawasan Kebangsaan | 5.1.1 Terlaksananya Pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan di Kab. Langkat dan Kecamatan | 6 Kali | 3 Kali | 100 |  |
|  | 5.1.2 Peningkatan Toleransi dan Pemberdayaan FKUB Kab. Langkat. | 3 Kali | 3 Kali | 100 |
|  | 5.1.3 Pencegahan, Penanggulangan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba terhadap Masyarakat | 1 Kali | 1 Kali | 100 |
|  | 5.1.4 Satgas Pemberantasan dan P4GN Kabupaten | 3 Kali | 3 Kali | 100 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 Tertingkatnya Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban  dan Keamanan | 6.1.1 Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa Se –Kab. Langkat | 3 Kali | 3 Kali | 100 |  |
| 7.1. Tertingkatnya Pendidikan Politik Masyarakat | * + 1. Terlaksananya Penelitian, Pemeriksaan Persyaratan Administrasi, Pengajuan, Penyerahan dan Bantuan Kepada Parpol     2. Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.     3. Tim Pemantau Perkembangan Politik Di Daerah     4. Pertemuan Orkemas se- Kabupaten Langkat     5. Sosialisasi Kepada Partai Politik | 1. Kali 2. Kali   1 Kali  1 Kali  1 Kali | 1 Kali  2 Kali  1 Kali  1 Kali  1 Kali | 100  100  100  100  100 |  |